JAFM: Journal of Accounting and Finance Management
E-ISSN: 2721-3013
P-ISSN: 2721-3005
https://dinastires.org/JAFM dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: https://doi.org/10.38035/jafm.v7i5.4009
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: November 3rd 2026 | **Revised:** November 9th 2026 | **Accepted:** November 15th 2026

Model Pengelolaan Aset Daerah Pada Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta

Sulastri Sulastri[1], Ridwan Rajab[2]
[1]Program Studi Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN, Jakarta, Indonesia, lastreebario@gmail.com
[2]Program Studi Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN, Jakarta, Indonesia, ridwan@stialan.ac.id

Corresponding Author: lastreebario@gmail.com[1]

Abstract: *Regional asset management is an important component of effective public administration, particularly in ensuring that assets are optimally utilized, maintained, and secured. This study aims to analyze regional asset management and formulate an asset management model at Badan Penghubung Provinsi Lampung in Jakarta. The study employed a qualitative approach using a case study method. Data were collected through interviews with parties involved in asset management, direct observations of asset conditions and management processes, and document reviews of administrative and asset management records. Data were analyzed through data collection, data reduction, data presentation, verification, and conclusion drawing, with data validity strengthened through source triangulation. The analysis employed the perspectives of Asset Management, Planning, Organizing, Actuating, and Controlling (POAC), and Good Governance. The results indicate that asset management remains suboptimal in planning, administration, utilization, maintenance, security, and supervision. Empirically, the number of assets increased from 521 units in 2021 to 664 units in 2025, while the inventory achievement reached 88.63%, with 30.15% of assets still requiring follow-up actions. Asset utilization also demonstrated economic potential, with 2024 realization reaching 142.62% at Wisma Lampung and 96.31% at Anjungan Lampung TMII. Based on these findings, the proposed management model integrates needs-based planning, asset administration and data integration, utilization optimization, maintenance and security, monitoring and evaluation, and supervision and control. The model is intended to improve effectiveness, efficiency, transparency, accountability, and the sustainable use and economic value of regional assets.*

Keywords: *Regional Asset Management, Asset Management*, POAC, *Good Governance, Asset Optimization*, Badan Penghubung Provinsi Lampung

Abstrak: Pengelolaan aset daerah merupakan bagian penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam memastikan aset dapat digunakan, dimanfaatkan, dipelihara, dan diamankan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan aset daerah serta merumuskan model pengelolaan aset pada Badan

Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang terlibat dalam pengelolaan aset, observasi terhadap kondisi dan proses pengelolaan aset, serta telaah dokumen administrasi dan pengelolaan aset. Analisis dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan, dengan keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber. Analisis menggunakan perspektif Manajemen Aset, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling (POAC), serta Good Governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset belum sepenuhnya optimal pada aspek perencanaan, penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan. Secara empiris, jumlah aset meningkat dari 521 unit pada 2021 menjadi 664 unit pada 2025, sedangkan capaian inventarisasi mencapai 88,63% dengan 30,15% aset masih memerlukan tindak lanjut. Pemanfaatan aset juga menunjukkan potensi ekonomi, dengan realisasi 2024 sebesar 142,62% pada Wisma Lampung dan 96,31% pada Anjungan Lampung TMII. Berdasarkan temuan tersebut, model pengelolaan yang dihasilkan mengintegrasikan perencanaan berbasis kebutuhan, penatausahaan dan integrasi data, optimalisasi pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan, monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian. Model ini diarahkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta nilai guna dan nilai ekonomi aset secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Pengelolaan Aset Daerah, Manajemen Aset, POAC, *Good Governance*, Optimalisasi Aset, Badan Penghubung Provinsi Lampung

PENDAHULUAN

Pengelolaan aset daerah merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena aset tidak hanya merepresentasikan kekayaan pemerintah, tetapi juga menjadi sumber daya strategis yang perlu dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Siklus pengelolaan aset meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, pengamanan, serta pengawasan. Optimalisasi pengelolaan aset memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada ketertiban administrasi, tetapi juga pada peningkatan nilai guna, efisiensi pemanfaatan, dan potensi ekonomi aset. Toha et al. (2025) menekankan pentingnya pemetaan aset dan penentuan pemanfaatan berdasarkan potensi terbaiknya, sedangkan Warsito (2025) membahas perlunya pergeseran paradigma menuju pengelolaan aset yang lebih efektif dan efisien.

Pengelolaan aset yang efektif juga membutuhkan penerapan fungsi Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling (POAC) secara terintegrasi. Fungsi perencanaan memastikan kebutuhan aset disusun berdasarkan kondisi dan prioritas organisasi; pengorganisasian memperjelas pembagian tugas serta kewenangan; pelaksanaan mengarahkan penggunaan dan pemanfaatan aset; sedangkan pengendalian memastikan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi. Penerapan fungsi tersebut perlu didukung prinsip good governance, terutama transparansi, akuntabilitas, integritas, dan pengawasan yang memadai. Dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, penerapan electronic government menjadi salah satu pendekatan untuk memperkuat efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan (Andayani et al., 2024).

Pada Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta, pengelolaan aset masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain belum optimalnya pemanfaatan beberapa aset, integrasi sistem yang belum sepenuhnya efektif, orientasi anggaran yang perlu diperbaiki, pembinaan yang belum optimal, serta keterbatasan kapasitas pengelola aset. Berdasarkan data penelitian, jumlah aset meningkat dari 521 unit pada 2021 menjadi 664 unit pada 2025, atau bertambah 143 unit (27,45%). Peningkatan tersebut menunjukkan perlunya penguatan kapasitas organisasi dalam penatausahaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan. Selain itu,

perencanaan anggaran perlu mempertimbangkan kebutuhan operasional, kondisi aset, dan capaian kinerja agar alokasi sumber daya dapat memberikan manfaat yang optimal. Kajian Komara (2025) mengidentifikasi fragmentasi data, keterbatasan kapasitas SDM, dan kurangnya koordinasi antarinstansi sebagai tantangan digitalisasi pengelolaan aset daerah. Sementara itu, He dan Ismail (2023) menunjukkan relevansi kapasitas staf dan penganggaran berbasis kinerja terhadap kinerja organisasi sektor publik, meskipun penelitian mereka dilakukan pada perguruan tinggi negeri di Tiongkok.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengelolaan aset pemerintah perlu dikaji melalui berbagai perspektif, termasuk digitalisasi, tata kelola, dan efektivitas penggunaan sumber daya. Namun, penelitian ini menempatkan integrasi siklus manajemen aset, POAC, dan prinsip good governance sebagai satu kesatuan model yang diterapkan secara kontekstual pada Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta. Kesenjangan penelitian terletak pada kebutuhan untuk menghubungkan perencanaan berbasis kebutuhan, penatausahaan dan integrasi data, optimalisasi pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan, serta monitoring dan pengendalian ke dalam satu kerangka pengelolaan yang terpadu. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi permasalahan pengelolaan aset, tetapi juga merumuskan model yang dapat digunakan sebagai dasar perbaikan proses dan peningkatan kinerja pengelolaan aset daerah.

Penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan model pengelolaan aset yang melampaui pendekatan administratif dengan mengintegrasikan perencanaan berbasis data dan kebutuhan, penatausahaan dan sistem informasi, pemanfaatan aset, pemeliharaan, pengamanan, pengawasan, penganggaran berbasis kinerja, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Penganggaran berbasis kinerja memungkinkan organisasi menghubungkan alokasi sumber daya dengan sasaran dan hasil yang ingin dicapai. He dan Ismail (2023) menunjukkan pentingnya kapasitas staf dan penganggaran berbasis kinerja dalam mendukung kinerja organisasi. Dalam konteks Indonesia, Afiah et al. (2025) membahas pemanfaatan biaya standar dalam sistem penganggaran berbasis kinerja pada institusi pemerintah. Model yang dikembangkan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta nilai guna dan nilai ekonomi aset secara berkelanjutan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk (a) menganalisis dan mendeskripsikan kondisi pengelolaan aset daerah pada Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta; (b) menganalisis orientasi dan tata kelola pengelolaan aset; serta (c) merumuskan model pengelolaan aset daerah yang efektif dan terintegrasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset pada Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai kondisi aktual pengelolaan aset daerah, faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya pengelolaan, serta alternatif model pengelolaan yang dapat dikembangkan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti mengkaji fenomena dalam konteks organisasi secara mendalam melalui interpretasi data empiris (Creswell & Poth, 2021). Penelitian dilaksanakan pada Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta dengan objek penelitian berupa siklus pengelolaan aset daerah, yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan. Tahapan tersebut dianalisis secara terintegrasi untuk mengidentifikasi kendala, mengevaluasi praktik pengelolaan yang berjalan, serta merumuskan model pengelolaan aset yang lebih efektif dan akuntabel, sebagaimana diilustrasikan pada gambar berikut:



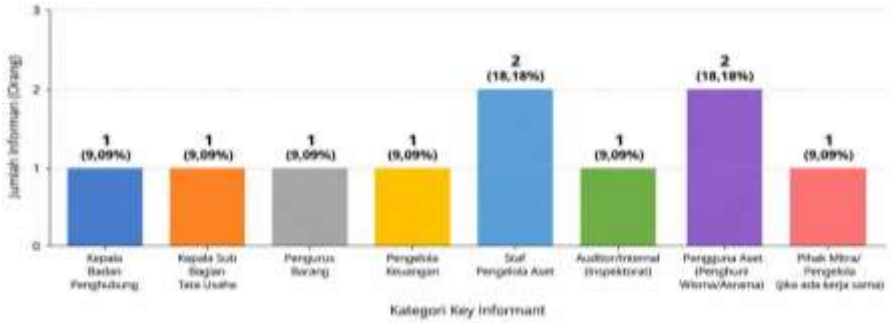
Gambar 1. Metodologi Penelitian
Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Pada Gambar 1 menunjukkan bahwa, proses pengelolaan aset daerah yang dilakukan secara bertahap dan terintegrasi. Proses diawali dengan perencanaan berbasis data dan kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan, kondisi, prioritas, dan ketersediaan sumber daya sebagai dasar pengelolaan aset. Tahap berikutnya adalah penatausahaan dan integrasi data untuk memastikan seluruh aset tercatat, teridentifikasi, dan memiliki informasi yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan dan aset diarahkan pada pemanfaatan sesuai fungsi dan potensinya, kemudian dilakukan pemeliharaan dan pengamanan untuk menjaga kondisi, keberlanjutan, serta perlindungan aset. Proses tersebut dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi untuk menilai kondisi, penggunaan, dan kinerja pengelolaan aset, serta pengawasan dan pengendalian untuk memastikan pelaksanaan sesuai ketentuan dan mendorong tindak lanjut atas permasalahan yang ditemukan. Seluruh tahapan tersebut bermuara pada optimalisasi nilai guna dan nilai ekonomi aset, sehingga pengelolaan aset dapat berlangsung secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset pada Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta masih perlu diperkuat, terutama dalam perencanaan, penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan. Kendala meliputi integrasi data, koordinasi antarunit, sistem informasi, dan kapasitas SDM (Warsito, 2025; Komara, 2025). Diperlukan model terintegrasi berbasis POAC dan good governance untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan aset (OECD, 2021; Toha et al., 2025).

Hasil wawancara dan telaah dokumen juga menunjukkan kesenjangan antara perencanaan anggaran dan kebutuhan operasional yang dinamis, sehingga diperlukan revisi anggaran dan penyesuaian kegiatan yang berpotensi mempengaruhi pencapaian kinerja. Kondisi ini menegaskan pentingnya perencanaan anggaran yang adaptif, berbasis kebutuhan, dan responsif terhadap perubahan operasional (He & Ismail, 2023), sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 2. Data Key Informant
Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Kondisi Pengelolaan Aset Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah belum sepenuhnya optimal. Permasalahan terjadi pada perencanaan, penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan,

pengamanan dan pengawasan. Peningkatan jumlah aset dari 521 unit pada 2021 menjadi 664 unit pada 2025 menunjukkan semakin besarnya beban pengelolaan aset. Namun, peningkatan kuantitas aset belum sepenuhnya diikuti penguatan sistem pengelolaan, terutama dalam integrasi data, penatausahaan, monitoring, dan pengendalian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah pada Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta masih menghadapi kendala dalam perencanaan, penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan. Jumlah aset meningkat dari 521 unit pada 2021 menjadi 664 unit pada 2025, atau bertambah 143 unit (27,45%). Peningkatan tersebut belum sepenuhnya diikuti penguatan sistem pengelolaan aset yang terintegrasi, khususnya dalam pencatatan, pemantauan, dan pengendalian.

Dari aspek pemanfaatan, Wisma Lampung dan Anjungan Lampung TMII menunjukkan potensi ekonomi, dengan realisasi pemanfaatan pada 2024 masing-masing sebesar 142,62% dan 96,31%. Namun, hasil inventarisasi dan sensus menunjukkan capaian sebesar 88,63%, terdiri atas 58,48% aset ditemukan dan 30,15% memerlukan tindak lanjut. Kondisi paling menonjol terdapat pada Anjungan Lampung TMII, dengan persentase aset ditemukan sebesar 31,80%. Temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan akurasi inventarisasi, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan aset.

Dari sisi pembiayaan, anggaran pengadaan barang/jasa dan pengelolaan aset meningkat dari Rp2,75 miliar pada 2021 menjadi Rp4,30 miliar pada 2025. Peningkatan anggaran tersebut perlu diimbangi dengan alokasi yang didasarkan pada kebutuhan, kondisi, prioritas, manfaat, dan kinerja aset agar penggunaannya lebih efektif dan efisien. Sementara itu, jumlah sumber daya manusia relatif stabil, yaitu 113 orang pada 2021, 114 orang pada 2022, 110 orang pada 2023, 112 orang pada 2024, dan 110 orang pada 2025. Pada 2025, terdapat 45 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Penguatan kompetensi, pembagian tugas, dan kapasitas pengelola aset menjadi aspek penting untuk mendukung pengelolaan aset yang efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan

Temuan Penelitian

Temuan penelitian menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan aset daerah bersifat sistemik dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui perbaikan administrasi. Permasalahan tersebut mencakup perencanaan yang belum sepenuhnya berbasis kebutuhan, kondisi, prioritas, dan kemampuan anggaran; penatausahaan serta pemutakhiran data yang belum optimal; dan koordinasi antarunit yang belum terintegrasi. Selain itu, sistem informasi aset masih memerlukan penguatan, sedangkan alokasi anggaran belum sepenuhnya berorientasi pada manfaat dan kinerja aset. Pembinaan pengelola aset juga belum terstruktur dan berkelanjutan, disertai kebutuhan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) serta penguatan monitoring dan evaluasi. Kondisi tersebut sejalan dengan kajian Warsito (2025) mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah serta Komara (2025) yang menyoroti pentingnya digitalisasi dalam pengelolaan aset daerah. Diperlukan pengelolaan aset yang terintegrasi, berbasis data dan kinerja, serta didukung tata kelola yang transparan dan akuntabel (OECD, 2021).

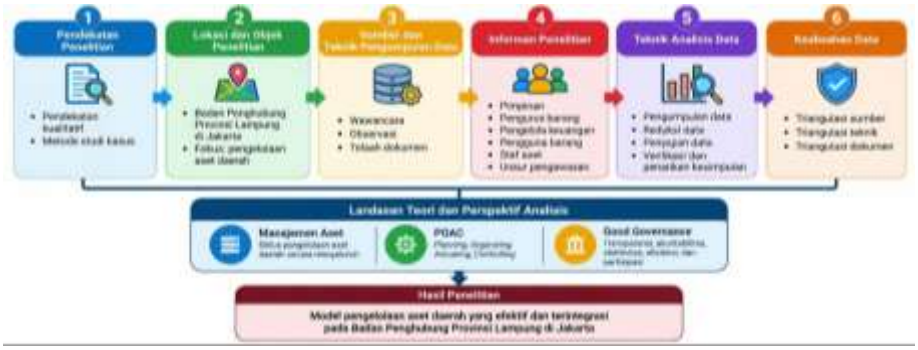
Orientasi dan Tata Kelola Pengelolaan Aset

Hasil penelitian menunjukkan perlunya pergeseran orientasi pengelolaan aset dari pendekatan yang berfokus pada tertib administrasi menuju pengelolaan berbasis kebutuhan, kondisi, prioritas, manfaat, dan kinerja aset. Pengelolaan aset yang berorientasi pada optimalisasi nilai guna memerlukan integrasi perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta evaluasi kinerja secara berkelanjutan (Toha et al., 2025; Warsito, 2025). Dalam perspektif Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling (POAC), perencanaan perlu didasarkan pada data yang akurat, pengorganisasian harus memperjelas tugas dan kewenangan, pelaksanaan diarahkan pada penggunaan dan pemeliharaan aset secara optimal, sedangkan pengawasan dilakukan melalui monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut. Sementara itu, prinsip good

governance menekankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, integritas, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum sebagai landasan pengelolaan sumber daya publik (OECD, 2021). Dengan demikian, integrasi POAC dan good governance menjadi landasan untuk mewujudkan tata kelola aset daerah yang lebih terarah, terukur, dan akuntabel.

Model Pengelolaan Aset yang Diusulkan

Berdasarkan hasil penelitian, model pengelolaan aset yang efektif dan terintegrasi dirumuskan sebagai berikut:



Gambar 3. Model Pengelolaan Aset Daerah Terintegrasi Berbasis Data dan Kebutuhan

Analisa pada gambar 3. menunjukkan bahwa, model pengelolaan aset terintegrasi yang terdiri atas tujuh tahapan yaitu:

a) **Perencanaan Berbasis Data dan Kebutuhan,** perencanaan menjadi tahap awal yang menentukan arah pengelolaan aset. Kebutuhan aset perlu ditetapkan berdasarkan data inventaris, kondisi aset, prioritas, kebutuhan organisasi, dan ketersediaan anggaran agar pengadaan maupun pengelolaan aset tepat sasaran.
b) **Penatausahaan & Integrasi Data,** penatausahaan diarahkan untuk memastikan seluruh aset tercatat, teridentifikasi, dan memiliki data yang akurat serta mutakhir. Integrasi data diperlukan untuk memudahkan pencatatan, pelacakan, pemantauan kondisi, lokasi, status penggunaan, dan pemanfaatan aset.
c) **Pemanfaatan Aset,** aset yang telah tercatat dan teridentifikasi perlu dioptimalkan sesuai fungsi dan potensinya. Pemanfaatan diarahkan agar aset tidak menjadi idle asset, tetapi mampu memberikan manfaat operasional maupun nilai ekonomi bagi organisasi dan daerah.
d) **Pemeliharaan & Pengamanan,** pemeliharaan dilakukan untuk menjaga kondisi dan memperpanjang masa manfaat aset, sedangkan pengamanan bertujuan memastikan aset terlindungi secara administratif, fisik, dan hukum. Keduanya perlu dilakukan secara terencana berdasarkan kondisi dan tingkat risiko aset.
e) **Monitoring & Evaluasi,** monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengetahui kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset. Hasil monitoring menjadi dasar untuk mengidentifikasi permasalahan, melakukan perbaikan, dan memastikan aset tetap digunakan serta dikelola sesuai tujuan.
f) **Pengawasan & Pengendalian,** pengawasan dan pengendalian berfungsi memastikan seluruh tahapan pengelolaan aset berjalan sesuai ketentuan, kewenangan, dan standar yang ditetapkan. Tahap ini juga menjadi mekanisme untuk mencegah penyimpangan, memperkuat akuntabilitas, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pengelolaan aset.
g) **Optimalisasi Nilai Guna dan Nilai Ekonomi Aset,** seluruh tahapan tersebut bermuara pada optimalisasi nilai guna dan nilai ekonomi aset. Aset tidak hanya dipandang sebagai objek administrasi, tetapi sebagai sumber daya yang harus memberikan manfaat maksimal melalui pengelolaan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Analisa Pengelolaan Asset

Pengelolaan aset pada Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta masih menghadapi kendala pada penatausahaan, integrasi data, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan, yang tercermin dari capaian inventarisasi 88,63%, dengan 58,48% aset ditemukan dan 30,15% masih memerlukan tindak lanjut, serta kondisi Anjungan Lampung TMII dengan aset ditemukan sebesar 31,80%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah aset belum sepenuhnya diikuti kualitas administrasi dan pengendalian yang memadai. Berdasarkan perspektif Manajemen Aset, POAC, dan Good Governance, solusi diarahkan pada penerapan model pengelolaan aset berbasis data dan terintegrasi melalui penguatan inventarisasi dan pemutakhiran data, integrasi sistem informasi, kejelasan pembagian tugas, peningkatan kompetensi SDM, serta monitoring dan evaluasi berkala, sehingga aset tidak hanya tertib secara administratif dan terlindungi, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan manfaat fungsional dan ekonomi, seperti pada gambar sebagai berikut:



Gambar 4. Model Pengelolaan Aset Daerah Terintegrasi Berbasis Kebutuhan, Data, Good Governance

Analisa pada gambar 4, menunjukkan bahwa, hasil model pengelolaan asset perlu dilaksanakan sebagai siklus yang terintegrasi, bukan sebagai kegiatan yang berdiri sendiri. Temuan nilai inventarisasi dan tindak lanjut menjadi bukti utama bahwa penguatan data, pemanfaatan, pemeliharaan, monitoring, serta pengawasan diperlukan untuk menghasilkan pengelolaan asset yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan:

a) **Perencanaan Berbasis Kebutuhan,** perencanaan asset perlu disusun berdasarkan kebutuhan riil, kondisi asset, skala prioritas, serta dukungan anggaran. Peningkatan jumlah asset dari 521 unit menjadi 664 unit menunjukkan semakin besarnya kebutuhan perencanaan yang sistematis agar penambahan asset diikuti kemampuan pengelolaan dan pemeliharaan. Hasil nilai: 664 unit asset pada 2025 atau meningkat 27,45% dari 2021.
b) **Penatausahaan dan Integrasi Data,** hasil inventarisasi menunjukkan bahwa penatausahaan asset belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat asset yang belum ditemukan atau memerlukan tindak lanjut, sehingga diperlukan pemutakhiran data dan integrasi asset informasi asset. Hasil nilai: capaian inventarisasi 88,63%, dengan 58,48% asset ditemukan dan 30,15% memerlukan tindak lanjut. Pada Anjungan Lampung TMII, asset yang ditemukan hanya 31,80%.
c) **Pemanfaatan Aset,** pemanfaatan asset menunjukkan adanya potensi ekonomi yang dapat dikembangkan, terutama pada Wisma Lampung dan Anjungan Lampung TMII. Namun, fluktuasi realisasi menunjukkan bahwa optimalisasi pemanfaatan masih perlu diperkuat melalui pengelolaan yang lebih produktif dan berorientasi manfaat. Hasil nilai pada 2024, realisasi tercatat 142,62 untuk Wisma Lampung dan 96,31 untuk Anjungan Lampung TMII.
d) **Pemeliharaan dan Pengamanan,** pemeliharaan dan pengamanan perlu menjadi bagian integral dari siklus pengelolaan asset. Bertambahnya jumlah asset menuntut dukungan

anggaran dan pengelolaan yang memadai agar asset tetap berfungsi, aman, dan memiliki umur manfaat yang optimal. Hasil nilai: anggaran pengadaan dan pengelolaan asset mencapai Rp4,30 miliar pada 2025, meningkat dari Rp2,75 miliar pada 2021.

e) **Monitoring dan Evaluasi,** monitoring dan evaluasi diperlukan untuk memastikan kondisi, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan asset berjalan sesuai rencana. Hasil inventarisasi menunjukkan masih adanya asset yang memerlukan tindak lanjut, sehingga evaluasi berkala diperlukan sebagai dasar perbaikan pengelolaan. Hasil nilai: 30,15% asset masih memerlukan tindak lanjut, menunjukkan perlunya penguatan monitoring dan evaluasi.

f) **Pengawasan dan Pengendalian,** pengawasan dan pengendalian menjadi tahap akhir sekaligus mekanisme umpan balik untuk memastikan seluruh proses pengelolaan asset berjalan sesuai ketentuan. Pengawasan perlu mencakup aspek administrasi, fisik, pemanfaatan, asset, dan kepatuhan serta menghasilkan tindak lanjut yang terukur. Hasil nilai: secara empiris, masih terdapat 30,15% asset yang memerlukan tindak lanjut, sehingga pengendalian dan penyelesaian temuan perlu diperkuat.

Faktor-Faktor Penyebab Belum Optimal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya pengelolaan aset pada Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kompetensi SDM, pemahaman regulasi, pembagian tugas dan kewenangan, serta kemampuan teknis pengelola aset. Kompetensi dan pemahaman regulasi yang belum merata berpengaruh terhadap konsistensi pelaksanaan pengelolaan BMD, sementara pembagian tugas yang belum sepenuhnya jelas dapat menimbulkan tumpang tindih maupun kesenjangan tanggung jawab.

Kemampuan teknis dalam inventarisasi, pencatatan, pemutakhiran data, pelaporan, penggunaan sistem informasi, dan monitoring masih perlu diperkuat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas pengelola aset perlu dilakukan secara terpadu melalui penguatan kompetensi, pembinaan regulasi, kejelasan kewenangan, peningkatan kemampuan teknis, dan koordinasi antarunit agar pengelolaan aset dapat berjalan lebih efektif, tertib, dan akuntabel, seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Analisa Faktor Penyebab

No	Aspek	Faktor Penyebab Belum Optimalnya	Uraian Permasalahan	Dampak terhadap Pengelolaan Aset
1	Pengelolaan Aset Saat Ini	Perencanaan	Perencanaan belum sepenuhnya berbasis data kondisi aset, kebutuhan riil, skala prioritas, dan kemampuan anggaran.	Kebutuhan pengadaan, pemeliharaan dan pemanfaatan asset belum sepenuhnya tepat sasaran.
		Penatausahaan	Pencatatan, inventarisasi, dan pemutakhiran data aset masih perlu ditingkatkan.	Akurasi data dan kualitas pelaporan aset belum optimal.
		Pemanfaatan	Sebagian aset belum dimanfaatkan secara maksimal sesuai fungsi dan potensi ekonominya.	Nilai guna dan nilai ekonomi aset belum optimal.
		Pemeliharaan	Pemeliharaan belum sepenuhnya dilakukan secara preventif dan berbasis kondisi aset.	Risiko kerusakan dan penurunan umur manfaat aset meningkat.
		Pengamanan	Pengamanan administratif dan fisik aset masih perlu diperkuat.	Meningkatkan risiko kehilangan, penyalahgunaan, dan ketidaktertiban aset.

		Pengawasan	Monitoring, evaluasi dan tindak lanjut terhadap kondisi serta penggunaan aset belum optimal.	Permasalahan aset tidak selalu dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara cepat.
2	Model Pengelolaan Aset Terintegrasi	POAC	Fungsi *Planning, Organizing, Actuating,* dan *Controlling* belum sepenuhnya berjalan secara terintegrasi.	Siklus pengelolaan aset belum berjalan secara efektif dan terpadu.
		Koordinasi	Koordinasi antarunit dan pihak yang terlibat dalam pengelolaan aset masih perlu diperkuat.	Informasi, kewenangan, dan tindak lanjut pengelolaan aset belum sepenuhnya sinkron.
		Sistem Informasi	Pemanfaatan sistem informasi belum sepenuhnya mendukung pengelolaan aset secara menyeluruh.	Pemutakhiran, monitoring, dan pelaporan data belum maksimal.
		Integrasi Data	Data aset belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebutuhan perencanaan, penganggaran, pemanfaatan dan pengawasan.	Pengambilan keputusan belum sepenuhnya didukung data yang terpadu.
		Pemanfaatan	Pengelolaan aset belum seluruhnya diarahkan pada optimalisasi fungsi dan potensi aset.	Masih terdapat aset yang kurang optimal pemanfaatannya.
3	Orientasi dan Distribusi Anggaran	Orientasi Anggaran	Anggaran belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan, kondisi, manfaat, dan kinerja aset.	Penggunaan anggaran belum sepenuhnya mendukung optimalisasi aset.
		Distribusi Anggaran	Alokasi anggaran belum sepenuhnya disesuaikan dengan kondisi, fungsi, urgensi, dan kebutuhan setiap aset.	Distribusi anggaran belum sepenuhnya efektif dan efisien.
		Prioritas Kebutuhan	Penetapan prioritas belum sepenuhnya berbasis kondisi, urgensi, risiko, fungsi pelayanan, dan potensi aset.	Pengadaan dan pengelolaan aset berpotensi kurang tepat sasaran.
		Pemeliharaan	Dukungan anggaran pemeliharaan masih perlu diperkuat dan diarahkan pada pemeliharaan preventif.	Keberlanjutan fungsi dan umur manfaat aset belum optimal.
4	Pembinaan Pengelolaan Aset	Pembinaan	Pembinaan pengelola BMD belum sepenuhnya terstruktur dan berkelanjutan.	Pemahaman dan konsistensi pelaksanaan pengelolaan aset belum merata.
		Koordinasi	Mekanisme koordinasi dalam pembinaan dan penyelesaian permasalahan aset masih perlu diperkuat.	Tindak lanjut permasalahan belum sepenuhnya terpadu.
		Monitoring	Monitoring kondisi, penggunaan, pemanfaatan dan administrasi aset belum optimal.	Permasalahan aset belum selalu teridentifikasi sejak dini.
		Evaluasi	Hasil monitoring belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan.	Perbaikan pengelolaan aset belum berjalan secara berkelanjutan.
		Regulasi	Implementasi dan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan BMD masih perlu diperkuat.	Pengelolaan asset belum sepenuhnya konsisten dengan ketentuan yang berlaku.
5	Kapasitas	Kompetensi SDM	Kompetensi SDM dalam	Kualitas dan

Pengelola Aset		pengelolaan BMD masih perlu ditingkatkan.	profesionalisme pengelolaan aset belum optimal.
	Pemahaman Regulasi	Pemahaman regulasi belum sepenuhnya merata pada seluruh pihak yang terlibat.	Berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan prosedur.
	Pembagian Tugas	Tugas, kewenangan, dan tanggung jawab pengelola aset masih perlu diperjelas.	Berpotensi terjadi tumpang tindih atau kesenjangan tanggung jawab.
	Kemampuan Teknis	Kemampuan teknis dalam inventarisasi, pencatatan, pemutakhiran data, pelaporan, monitoring, dan penggunaan sistem informasi masih perlu diperkuat.	Ketepatan dan kualitas pengelolaan data aset belum maksimal.

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Strategi Pengelolaan Asset

Faktor penyebab belum optimalnya pengelolaan aset, strategi peningkatan Model Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta diarahkan pada penguatan pengelolaan aset secara menyeluruh, hasil analisa strategi sebagai berikut:

Tabel 2. Strategi Peningkatan Model Pengelolaan Aset

No	Aspek	Pendekatan	Permasalahan Utama	Strategi Peningkatan	Output yang Diharapkan	Indikator Keberhasilan
1	Pengelolaan Aset Saat Ini	Manajemen Aset & POAC	Perencanaan, penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, dan Pengawasan belum optimal.	Penguatan pengelolaan aset secara terpadu berbasis data dan kebutuhan.	Pengelolaan aset lebih tertib, terintegrasi, dan terkontrol.	Meningkatnya ketertiban penatausahaan dan optimalisasi pemanfaatan aset.
2	Model Pengelolaan Aset Terintegrasi	POAC & *Good Governance*	Koordinasi, sistem informasi, dan integrasi data belum optimal.	Penerapan POAC, penguatan koordinasi, integrasi data dan sistem informasi.	Model pengelolaan aset yang efektif dan terintegrasi.	Tersedianya data terintegrasi dan meningkatnya koordinasi antarunit.
3	Orientasi dan Distribusi Anggaran	*Performance -Based Asset Budgeting*	Orientasi dan distribusi anggaran belum sepenuhnya berbasis kebutuhan, prioritas, kondisi, dan manfaat aset.	Penganggaran berdasarkan kebutuhan, kondisi, prioritas, manfaat, kinerja, dan pemeliharaan aset.	Alokasi anggaran tepat sasaran dan mendukung keberlanjutan aset.	Meningkatnya ketepatan alokasi anggaran dan optimalisasi pemeliharaan aset.
4	Pembinaan Pengelolaan Aset	*Good Governance*	Pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan kepatuhan regulasi belum optimal.	Penguatan pembinaan terstruktur, monitoring, evaluasi, pengawasan, dan kepatuhan regulasi.	Pengelolaan aset yang tertib, responsif, dan sesuai regulasi.	Meningkatnya kepatuhan dan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi.
5	Kapasitas Pengelola Aset	Manajemen SDM & *Good Governance*	Kompetensi, pemahaman regulasi, pembagian tugas, dan kemampuan teknis belum optimal.	Peningkatan kompetensi, pemahaman regulasi, kejelasan tugas, dan kemampuan teknis serta sistem informasi.	SDM pengelola asset yang kompeten dan profesional.	Meningkatnya kompetensi, ketepatan pengelolaan, dan kualitas data aset.

Hasil Analisis Strategi

Pengelolaan aset pada Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta masih menghadapi kendala pada penatausahaan, integrasi data, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan, yang tercermin dari capaian inventarisasi 88,63%, dengan 58,48% aset ditemukan dan 30,15% masih memerlukan tindak lanjut. Permasalahan paling menonjol terdapat pada Anjungan Lampung TMII, dengan aset ditemukan sebesar 31,80%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah aset belum sepenuhnya diikuti kualitas administrasi dan pengendalian yang memadai. Manajemen Aset, POAC, dan Good Governance, pengelolaan aset perlu dilaksanakan secara menyeluruh melalui perencanaan berbasis data, pembagian tugas dan kewenangan yang jelas, optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan, serta monitoring, evaluasi, dan pengendalian yang konsisten. Solusi yang dihasilkan adalah penerapan model pengelolaan aset berbasis data dan terintegrasi melalui penguatan inventarisasi dan pemutakhiran data, integrasi sistem informasi, peningkatan kompetensi SDM, penguatan koordinasi, serta monitoring dan evaluasi berkala. Model tersebut diarahkan agar aset tidak hanya tertib secara administratif dan terlindungi, tetapi juga mampu memberikan manfaat fungsional dan nilai ekonomi secara optimal dan berkelanjutan, seperti pada gambar sebagai berikut:



Gambar 5. Model Pengelolaan Aset Daerah Terintegrasi

Analisa pada gambar 5 menunjukkan bahwa, hasil model pengelolaan aset perlu dilaksanakan sebagai siklus yang terintegrasi, bukan sebagai kegiatan yang berdiri sendiri. Temuan nilai inventarisasi dan tindak lanjut menjadi bukti utama bahwa penguatan data, pemanfaatan, pemeliharaan, monitoring, serta pengawasan diperlukan untuk menghasilkan pengelolaan aset yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan:

a) **Perencanaan Berbasis Kebutuhan,** perencanaan aset perlu disusun berdasarkan kebutuhan riil, kondisi aset, skala prioritas, serta dukungan anggaran. Peningkatan jumlah aset dari 521 unit menjadi 664 unit menunjukkan semakin besarnya kebutuhan perencanaan yang sistematis agar penambahan aset diikuti kemampuan pengelolaan dan pemeliharaan. Hasil nilai: 664 unit aset pada 2025 atau meningkat 27,45% dari 2021.
b) **Penatausahaan dan Integrasi Data,** hasil inventarisasi menunjukkan bahwa penatausahaan aset belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat aset yang belum ditemukan atau memerlukan tindak lanjut, sehingga diperlukan pemutakhiran data dan integrasi sistem informasi aset. Hasil nilai: capaian inventarisasi 88,63%, dengan 58,48% aset ditemukan dan 30,15% memerlukan tindak lanjut. Pada Anjungan Lampung TMII, aset yang ditemukan hanya 31,80%.
c) **Pemanfaatan Aset,** pemanfaatan aset menunjukkan adanya potensi ekonomi yang dapat dikembangkan, terutama pada Wisma Lampung dan Anjungan Lampung TMII. Namun, fluktuasi realisasi menunjukkan bahwa optimalisasi pemanfaatan masih perlu diperkuat melalui pengelolaan yang lebih produktif dan berorientasi manfaat. Hasil nilai: pada 2024, realisasi tercatat 142,62 untuk Wisma Lampung dan 96,31 untuk Anjungan Lampung TMII.
d) **Pemeliharaan dan Pengamanan,** pemeliharaan dan pengamanan perlu menjadi bagian

integral dari siklus pengelolaan aset. Bertambahnya jumlah aset menuntut dukungan anggaran dan pengelolaan yang memadai agar aset tetap berfungsi, aman, dan memiliki umur manfaat yang optimal. Hasil nilai: anggaran pengadaan dan pengelolaan aset mencapai Rp4,30 miliar pada 2025, meningkat dari Rp2,75 miliar pada 2021.

e) **Monitoring dan Evaluasi,** monitoring dan evaluasi diperlukan untuk memastikan kondisi, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan aset berjalan sesuai rencana. Hasil inventarisasi menunjukkan masih adanya aset yang memerlukan tindak lanjut, sehingga evaluasi berkala diperlukan sebagai dasar perbaikan pengelolaan. Hasil nilai: 30,15% aset masih memerlukan tindak lanjut, menunjukkan perlunya penguatan monitoring dan evaluasi.

f) **Pengawasan dan Pengendalian,** pengawasan dan pengendalian menjadi tahap akhir sekaligus mekanisme umpan balik untuk memastikan seluruh proses pengelolaan aset berjalan sesuai ketentuan. Pengawasan perlu mencakup aspek administrasi, fisik, pemanfaatan, risiko, dan kepatuhan serta menghasilkan tindak lanjut yang terukur. Hasil nilai: secara empiris, masih terdapat 30,15% aset yang memerlukan tindak lanjut, sehingga pengendalian dan penyelesaian temuan perlu diperkuat.

Penerapan Scientific Management

Penerapan Scientific Management dalam pengelolaan aset daerah diawali dengan perencanaan berbasis data, meliputi informasi inventaris, kondisi aset, kebutuhan organisasi, skala prioritas, serta evaluasi pemanfaatan aset sebelumnya. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa pengadaan dan penggunaan aset didasarkan pada kebutuhan nyata serta mendukung efisiensi sumber daya. Dalam konteks pengelolaan aset publik di Indonesia, kepatuhan terhadap regulasi, ketertiban administrasi, dan optimalisasi pemanfaatan aset merupakan aspek penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan aset daerah (Tirayoh et al., 2021; Wicaksana et al., 2021).

Pembagian kerja dan spesialisasi dilaksanakan melalui penetapan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas antara pimpinan, Tata Usaha, Pengurus Barang, Pengelola Keuangan, dan Staf Pengelola Aset. Pembagian tersebut perlu disertai standardisasi pekerjaan melalui prosedur operasional standar (SOP) yang mencakup inventarisasi, pencatatan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, pelaporan, hingga penghapusan aset. Kejelasan tanggung jawab dan koordinasi antarunit menjadi semakin penting ketika pengelolaan aset melibatkan berbagai unit kerja serta sistem informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi (Komara, 2025). Aspek berikutnya adalah seleksi dan pengembangan SDM berdasarkan kompetensi yang sesuai dengan tugas pengelolaan aset. Penguatan kapasitas perlu mencakup pemahaman regulasi, administrasi aset, inventarisasi, pemutakhiran data, pelaporan, serta pengoperasian sistem informasi. Kompetensi digital dan dukungan organisasi berperan dalam meningkatkan kinerja pengelolaan aset, sehingga penerapan teknologi perlu diikuti dengan pelatihan, pendampingan, dan pembinaan yang berkelanjutan (Wulansari et al., 2025).

Penerapan Scientific Management juga memerlukan pengukuran kinerja berdasarkan indikator yang terukur, seperti akurasi data inventaris, tingkat pemanfaatan aset, kondisi dan pemeliharaan aset, penyelesaian tindak lanjut, serta kepatuhan administrasi. Hasil pengukuran tersebut menjadi dasar monitoring berkala, evaluasi kinerja, pemeriksaan internal, dan penetapan tindakan korektif. Penggunaan sistem informasi yang mendukung pencatatan dan pemantauan secara terintegrasi dapat memperkuat transparansi serta akuntabilitas pengelolaan aset publik (Komara, 2025). Penerapan Scientific Management diarahkan untuk membangun pengelolaan aset yang sistematis, terstandar, terukur, dan berorientasi pada efisiensi. Integrasi antara perencanaan berbasis data, pembagian kerja, standardisasi prosedur, pengembangan kompetensi, serta pengawasan kinerja diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan aset dan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta

Kebaruan (Novelty) Penelitian

Kebaruan utama penelitian ini terletak pada pengembangan model pengelolaan aset daerah yang mengintegrasikan konsep Manajemen Aset, fungsi manajemen Planning, Organizing, Actuating, and Controlling (POAC), serta prinsip Good Governance ke dalam satu siklus pengelolaan yang berbasis kebutuhan dan data. Integrasi ini relevan dengan kajian pengelolaan aset pemerintah daerah yang mengidentifikasi persoalan fragmentasi tata kelola, perencanaan, transparansi, koordinasi, dan evaluasi pemanfaatan aset (Sumaryana et al., 2024). Model yang dikembangkan menghubungkan perencanaan, penatausahaan dan integrasi data, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan, monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang bermuara pada optimalisasi nilai guna dan nilai ekonomi aset. Penekanan pada keterpaduan fungsi pengelolaan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan aset daerah berkaitan dengan penerapan tata kelola yang baik dan sistem pengendalian internal dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset tetap (Yudi et al., 2022).

Berbeda dari pendekatan yang lebih berorientasi pada pemenuhan administrasi, penelitian ini memosisikan aset sebagai sumber daya strategis yang perlu dikelola berdasarkan kebutuhan, kondisi, prioritas, manfaat, kinerja, dan potensi ekonominya. Orientasi tersebut juga menekankan pentingnya pengembangan organisasi dan pelaporan terintegrasi untuk mendukung optimalisasi aset serta akuntabilitas organisasi (Hifni et al., 2022). Kebaruan berikutnya terletak pada penerapan model dalam konteks Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta. Konteks ini memungkinkan pengembangan model yang mempertimbangkan karakteristik organisasi, kebutuhan operasional, kapasitas pengelola, serta kondisi pemanfaatan aset yang dikelola. Dengan demikian, kontribusi penelitian tidak hanya terletak pada integrasi Manajemen Aset, POAC, dan Good Governance, tetapi juga pada penyusunan model yang kontekstual dan implementatif untuk memperkuat efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah pada Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta belum sepenuhnya optimal, terutama pada aspek perencanaan, penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, monitoring, dan pengawasan. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh peningkatan jumlah aset dari 521 unit pada 2021 menjadi 664 unit pada 2025, sementara hasil inventarisasi mencapai 88,63% dan masih terdapat 30,15% aset yang memerlukan tindak lanjut. Permasalahan juga berkaitan dengan integrasi data, koordinasi antarunit, kapasitas SDM, sistem informasi, penganggaran, serta pengendalian aset. Sebagai solusi, penelitian menghasilkan model pengelolaan aset terintegrasi yang menghubungkan perencanaan berbasis kebutuhan dan data, penatausahaan dan integrasi data, pemanfaatan aset, pemeliharaan dan pengamanan, monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian.

Implementasi model perlu didukung penguatan koordinasi antarunit, pemutakhiran sistem informasi aset, peningkatan kompetensi SDM, penganggaran berbasis kebutuhan dan kinerja, serta tindak lanjut hasil monitoring dan pengawasan secara konsisten. Model tersebut diarahkan untuk mengubah orientasi pengelolaan aset dari sekadar tertib administratif menuju pengelolaan berbasis kebutuhan, kondisi, prioritas, manfaat, dan kinerja aset. Dengan mengintegrasikan perspektif Manajemen Aset, POAC, dan Good Governance, model diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta nilai guna dan nilai ekonomi aset secara berkelanjutan.

REFERENSI

Abduh, M., Sukardi, S. N., Wirahadikusumah, R. D., Oktaviani, C. Z., & Bahagia, S. N. (2023). Maturity of procurement units for public construction projects in Indonesia. International

Journal of Construction Management, 23(13), 2171–2184. https://doi.org/10.1080/15623599.2022.2046941

Afiah, N. N., et al. (2025). The utilization of standard costs in performance-based budgeting system in Indonesian government institutions. Indonesian Treasury Review, 10(2), 119–

Ahmad, H., Abul Hassan, S. H., & Ismail, S. (2023). Transparency level of the electronic procurement system in Malaysia. Journal of Financial Reporting and Accounting, 21(3), 592–606. https://doi.org/10.1108/JFRA-07-2021-0181

Andayani, W., Dahlia, Putrianti, E., Wisdaningrum, O., Putranto, P., & Yanuarisa, Y. (2024). Penguatan good governance: Pengalaman penerapan electronic government pemerintah

Bauhr, M., Czibik, Á., de Fine Licht, J., & Fazekas, M. (2020). Lights on the shadows of public procurement: Transparency as an antidote to corruption. Governance, 33(3), 495–523. https://doi.org/10.1111/gove.12432

Cao, F., & Wang, C. (2023). Corruption, accountability, and discretion of procurement officials: An analysis of selection preferences for performance-based evaluation criteria in PPP procurement. PLOS ONE, 18(3), e0282542. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0282542

Changalima, I. A., Mchopa, A. D., & Ismail, I. J. (2022). Supplier development and public procurement performance: Does contract management difficulty matter? Cogent Business & Management, 9(1), 2108224.

Changalima, I. A., Mchopa, A. D., & Ismail, I. J. (2023). Supplier monitoring and procurement performance in the public sector in Tanzania: The moderating role of contract management difficulty. IIM Ranchi Journal of Management Studies, 2(1), 16–30. https://doi.org/10.1108/IRJMS-04-2022-0039

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2021). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). SAGE.

daerah di Indonesia. Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi dan Keuangan, 6(2), 116–131. https://doi.org/10.52005/aktiva.v6i2.240

Dani, B. S., & Revindo, M. D. (2025). Implementation of e-procurement policy and corruption in public procurement: The case of Indonesia. International Journal of Electronic Governance, 17(2), 208–221. https://doi.org/10.1504/IJEG.2025.148167

Darnall, N., Iwata, K., & Hsueh, L. (2022). E-procurement system adoption in local governments: The role of procurement complexity and organizational structure. Public Management Review, 24(6), 903–925. https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1874497

David, A., Addo, S. K., & Kofi Isaac, I. K. Y. (2024). Enforcing ethical codes of conduct in procurement and its impact on public procurement performance in Ghana. African Journal of Procurement, Logistics & Supply Chain Management, 7(8), 72–92. https://doi.org/10.4314/ajplscm.v7i8.5

Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). The new public service: Serving, not steering (4th ed.). Routledge.

Denzin, N. K. (2017). The research act: A theoretical introduction to sociological methods.

Dye, T. R. (2013). Understanding public policy (14th ed.). Pearson.

Fadlila, A. K. (2024). Relationship between public procurement governance and the performance of government agencies in Indonesia. Indonesian Journal of Multidisciplinary Science, 4(2). https://doi.org/10.55324/ijoms.v4i2.1026

Firmansyah, A., Maulana, R. Y., & Miftah, A. Z. (2024). Transformation of the procurement system in the Indonesian government. Sosiohumaniora, 26(2).

Frigo, A., & Mocetti, S. (2026). The effects of digitalization on the functioning of the public sector: Evidence from e-procurement. Journal of Economic Behavior & Organization, 246, 107587. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2026.107587

He, L., & Ismail, K. (2023). Do staff capacity and performance-based budgeting improve

organisational performance? Empirical evidence from Chinese public universities. Humanities and Social Sciences Communications, 10(1), Article 1. https://doi.org/10.1057/s41599-023-01523-2

Hifni, S., Sayudi, A., & Wijaya, R. (2022). Role of organizational development, integrated reporting implementation and optimizing on regional asset management. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), 5(2). https://www.bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/4900

Hill, M. J., & Hupe, P. L. (2014). Implementing public policy: An introduction to the study of operational governance (3rd ed.). SAGE.

Hochstetter, J., Vásquez, F., Diéguez, M., Bustamante, A., & Arango-López, J. (2023). Transparency and e-government in electronic public procurement as sustainable development. Sustainability, 15(5), 4672. https://doi.org/10.3390/su15054672

Jaffu, R., & Changalima, I. A. (2023). Human resource development practices and procurement effectiveness: Implications from public procurement professionals in Tanzania. European Journal of Management Studies, 28(2), 149–169. https://doi.org/10.1108/EJMS-04-2022-0030

Jiménez, A., Hanoteau, J., & Barkemeyer, R. (2022). E-procurement and firm corruption to secure public contracts: The moderating role of governance institutions and supranational support. Journal of Business Research, 149, 640–650. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.05.070

Kasmono, A., Purwono, R., & Herawati, N. (2025). Electronic procurement to improve sustainability and digital transformation in government procurement. Journal of Distribution Science, 23(4), 91–102. https://doi.org/10.15722/jds.23.04.202504.91

Khorana, S., Caram, S., & Rana, N. P. (2024). Measuring public procurement transparency with an index: Exploring the role of e-GP systems and institutions. Government Information Quarterly, 41(3), 101952. https://doi.org/10.1016/j.giq.2024.101952

Komara, S. R. (2025). Reformasi pengelolaan aset daerah melalui upaya digitalisasi di wilayah DKI Jakarta. JANE (Jurnal Administrasi Negara). https://jurnal.unpad.ac.id/jane/article/view/65606/0

Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik: Edisi terbaru. Andi.

Matza, S., Rahmawati, D. E., Nurmandi, A., & Suswanta, S. (2020). Corruption in procurement of goods and services in Makassar City. Journal of Governance and Public Policy, 7(2), 128–138. https://doi.org/10.18196/jgpp.72128

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE.

Murti, D. M. R., & Putro, U. S. (2021). Public procurements performance measurement in Indonesian FDA according to Head of National Public Procurement Agency's Circular Letter Number 2 of Year 2021 concerning Procurement Governance Index. Budapest International Research and Critics Institute-Journal.

Mwagike, L. R. (2025). Staff competence and job performance of public procurement professionals: The moderating effect of procurement regulatory compliance. International Review of Public Administration, 30(2), 136–155. https://doi.org/10.1080/12294659.2025.2463133

Mwakolo, A., Siwandeti, M., Mahuwi, L., & Israel, B. (2024). Procurement of good governance as a strategic tool for achieving value for money in public construction projects. LBS Journal of Management & Research, 22(2), 129–146. https://doi.org/10.1108/LBSJMR-08-2023-0027

OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/1c258f55-en

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). Government at a glance 2021.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). Government at a glance

2023.
Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). Lessons learned from the implementation of the European Competency Framework for Public Procurement Professionals: Towards an international competency framework. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/a0b8c9b7-en
Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). Public procurement performance: A framework for measuring efficiency, compliance and strategic goals. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/0dde73f4-en
Patrucco, A. S., Agasisti, T., & Glas, A. H. (2021). Structuring public procurement in local governments: The effect of centralization, standardization and digitalization on performance. Public Performance & Management Review, 44(3), 630–656. https://doi.org/10.1080/15309576.2020.1851267
Procurement governance in reducing corruption in the Indonesian public sector: A mixed method approach. (2024). Cogent Business & Management. https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2393744
Procurement maturity and IT failures in the public sector. (2022). Transforming Government: People, Process and Policy, 16(4), 554–566. https://doi.org/10.1108/TG-07-2022-0097
Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Republik Indonesia. (2010). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025.
Republik Indonesia. (2014). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innovations (5th ed.). Free Press. Routledge.
Saesario, A. J., & Efrilianda, D. A. (2023). Analysis of digital supply chain management in e-procurement service usage using decision making trial and evaluation laboratory in National Public Procurement Agency. Scientific Journal of Informatics, 10(2). https://doi.org/10.15294/sji.v10i2.42224
Schein, E. H., & Schein, P. A. (2017). Organizational culture and leadership (5th ed.). Wiley. Scott, W. R. (2014). Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities (4th ed.). SAGE.
Sholeh, M., Widjajanti, K., & Lestari, R. I. (2024). Penerapan good governance pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis, 16(3), 266–279. https://doi.org/10.26623/jreb.v16i3.6844
Steinfeld, J. M. (2022). Leadership and stewardship in public procurement: Roles and

responsibilities, skills and abilities. Journal of Public Procurement, 22(3), 205–221. https://doi.org/10.1108/JOPP-04-2021-0024

Styrin, E., Sanina, A., Ataeva, A., & Rodionova, Y. (2026). Public procurement as a platform: An ecosystem capability framework. Public Administration and Development, 1–18. https://doi.org/10.1002/pad.70092

Sumaryana, A., Komara, S. R., & Pancasilawan, R. (2024). Rethinking local government asset management in Indonesia: Governance, planning, and policy evaluation. Journal of Contemporary Governance and Public Policy, 5(2), 217–232. https://doi.org/10.46507/jcgpp.v5i2.643

Tirayoh, V., Latjandu, L., Sabijono, H., & Mintardjo, C. (2021). Public sector asset management in the government of Indonesia: A case study in Minahasa Regency. Jurnal Bina Praja, 13(2), 195–

Toha, S. N., Ghiffari, A., & Irzal, F. (2025). Optimization strategies for government asset management in Jakarta using multi-criteria analysis. Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan, 13(1), 247–256. https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i1.2974

Warsito, A. (2025). Evaluasi paradigma pengelola aset dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD): Studi pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Jurnal Bina Praja, 17(1), 89–102. https://doi.org/10.21787/jbp.17.2025.89-102

Wicaksana, A., Harmono, & Yuniarti, S. (2021). Pengaruh inventarisasi aset, penggunaan aset, pengamanan dan pemeliharaan aset terhadap optimalisasi aset tetap tanah pada pemerintah Kabupaten Malang. Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 6(1), 1–14. https://doi.org/10.26905/pjiap.v6i1.5514

Wulansari, et al. (2025). [Detail judul, nama penulis lengkap, jurnal, volume, nomor, dan DOI perlu diverifikasi sebelum dicantumkan dalam daftar pustaka final.]

Yudi, Rahayu, S., & Rahayu. (2022). Asset management as moderating good governance and internal control on utilization optimization regional fixed assets. Research Journal of Finance and Accounting, 13(6). https://doi.org/10.7176/RJFA/13-6-02